

Menonton tayangan televisi dan tampilan media cetak Australia tentang Papua bukan sesuatu yang menyenangkan bagi warga Indonesia yang berdomisili di Australia, khususnya setelah Jakarta menarik Duta Besar T.M.

Hamzah Thayeb dari Canberra. Media Australia tidak saja menampilkan "kemarahan" Jakarta atas pemberian visa tinggal sementara (temporary visa) kepada 42 dari 43 pencari suaka (asylum seekers) dari Papua, tapi juga menayangkan perilaku pemerintah Indonesia di Papua.

Terus terang, menyaksikan perilaku pemerintah Indonesia di Papua tidak saja mengurangi kebanggaan kita sebagai negara yang dikenal "berbudi luhur", tapi juga menunjukkan betapa bebalnya pemerintah Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari sejarah panjang provinsi tercinta tapi bernasib malang itu.

Pemerintah Indonesia, khususnya TNI, polisi, dan pemerintah daerah Papua, seharusnya tidak lagi menunggu "diajari" Australia untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Soalnya, mereka sebenarnya sudah tahu persis akar permasalahan Papua, tapi mereka enggan melakukan introspeksi dan memperbaiki tindakan serta kebijakan mereka yang salah selama 40 tahun terakhir ini.

Ketidakadilan dan seribu permasalahan lain, seperti pengerukan kekayaan alam Papua yang hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang Jakarta dan petinggi-petinggi Papua serta keterlibatan aparat keamanan (TNI dan polisi) dalam kegiatan melanggar hukum, seperti pembalakan liar (illegal logging), perdagangan gelap kayu gaharu, bahkan pembunuhan dan penangkapan para aktivis Papua, hanya sebagian kecil dari rentetan derita panjang Papua.

Sekali lagi, ketidakadilan di atas bukan sesuatu yang baru karena pemerintah Indonesia telah melakukannya sejak dulu dan sistematis. Akibatnya, orang di belahan bumi lain pun tahu persis semua kejadian di Papua, termasuk pemerintah dan warga negara Australia. Karena itu, ketika 43 warga Papua mendarat di Cape York di Negara Bagian Queensland dan meminta suaka politik kepada pemerintah Australia, John Howard dan kabinetnya menilai permohonan tersebut sebagai sesuatu yang serius.

Indonesia di mata Australia

Tidak dapat dimungkiri bahwa kunjungan Susilo Bambang Yudhoyono ke Canberra tahun lalu berhasil mengubah sebagian pandangan negatif pemerintah dan masyarakat Australia atas Indonesia. Tapi sikap pemerintah dan sebagian besar masyarakat Australia atas isu-isu Papua masih belum berubah secara radikal. Mereka masih sangat sensitif dengan semua kejadian di Bumi Cenderawasih tersebut.

Pemerintah Indonesia juga harus sadar bahwa Howard tidak bekerja sendiri. Sebagai perdana menteri, dia juga dikontrol oleh parlemen, hukum nasional dan internasional, serta semua warga Australia. Karena itu, John Howard wajib memperhatikan opini publik Australia, termasuk dalam penentuan nasib 43 orang Papua yang mencari suaka di negaranya.

Pemerintah Indonesia dan DPR seharusnya tidak kaget dengan keputusan Department of Immigration and Multicultural Affairs (DIMIA) yang memberikan visa tinggal sementara kepada 42 orang Papua tersebut. Soalnya, di mata publik Australia, perilaku pemerintah Indonesia di Papua dianggap telah melampaui batas-batas kemanusiaan.

Indonesia bahkan telah dianggap gagal menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial di bumi yang subur dan seharusnya makmur itu.

Berbagai komentar negatif politikus Indonesia atas pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua tersebut mungkin dapat dipahami karena mungkin saja klaim para pencari suaka itu tidak seratus persen benar. Tapi dampak kebijakan pemerintah pusat yang tidak memihak rakyat Papua sejak 40 tahun terakhir ini tidak bisa dilupakan begitu saja.

Senator Amanda Vanstone yang menjabat menteri imigrasi menjelaskan, "Australia was impartially meeting its obligations under domestic and international law." Selanjutnya, Herman Wainggai, pemimpin para pencari suaka tersebut, mengatakan, "We trust that the Indonesia will act with maturity and see that the situation in West Papua is very serious and one that must be dealt with peacefully" (Kami percaya Indonesia akan bersikap dewasa dan melihat keadaan di Papua dengan serius dan harus diselesaikan dengan damai) (Sydney Morning Herald, 23 Maret 2006).

Perlu pula dicatat bahwa penilaian pemerintah dan publik Australia atas pemberian visa tinggal sementara kepada para pencari suaka dari Papua tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kejadian dua minggu terakhir ini. Soalnya, layar televisi dan koran Australia juga

diwarnai dengan maraknya tindak kekerasan di Papua.

Pemimpin Partai

Hijau (Green Party), Senator Bob Brown, bahkan secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Pendeknya, pandangan umum masyarakat Australia atas ketidakadilan di Papua tidak memihak pemerintah Indonesia.

Introspeksi

Melihat makin meningkatnya perhatian dunia internasional atas isu-isu Papua, pemerintah Indonesia sudah saatnya introspeksi agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Tindakan pemanggilan T.M. Hamzah Thayeb mungkin terlalu emosional karena hal itu tidak akan menghilangkan isu-isu Papua. Tindakan tersebut bahkan telah menjadikan isu Papua menjadi isu internasional yang lebih luas.

President of the

West Papua National Authority Edison Waromi bahkan mengakui bahwa para pencari suaka lainnya akan menyusul ke Australia dalam jumlah besar. Di samping itu, pemanggilan Hamzah Thayeb dianggap sesuatu yang tidak serius oleh Australia karena Menteri Luar Negeri Alexander Downer bahkan berani mengatakan, "I expected protests of one kind or another from Indonesia, but bilateral relations would settle down after a short period of time" (The Sydney Morning Herald, 25 Maret 2006).

Tindakan bijak yang perlu dilakukan Jakarta seharusnya hanya sebatas protes resmi atau pemanggilan Duta Besar Australia ke Pejambon. Tapi protes tersebut harus diikuti dengan komunikasi intensif dengan seluruh elemen pemerintah Australia.

Di samping itu, Presiden dan anggota DPR seharusnya lebih mengkonsentrasikan diri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan pembangunan nyata, dan bukan dengan janji-janji kosong lagi.

Presiden dan DPR serta segelintir "tokoh masyarakat Papua" sudah saatnya menjauhkan diri dari

praktek-praktek politicking yang mengatasnamakan rakyat Papua, karena sejarah mengajarkan bahwa tindakan-tindakan serupa hanya menambah derita mayoritas orang Papua.

Presiden, DPR, dan politikus daerah Papua harus berani mengakui kesalahan mereka bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat selama 40 tahun terakhir ini telah gagal membangun Papua dan masyarakatnya. Tanpa tindakan jantan seperti itu, pemerintah dan para politikus hanya akan saling tuding dan lupa mengimplementasikan janji-janji pembangunan yang memihak rakyat Papua.

Ketidaksanggupan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan iklim yang sehat bagi masyarakat Papua tidak saja akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Papua, tapi juga berpotensi menyuburkan para pencari suaka di masa mendatang. Karena itu, suara-suara keras di DPR yang mendukung pemanggilan T.M. Hamzah Thayeb, bahkan meminta pemutusan hubungan diplomatik tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memperburuk masalah Papua.

Pemerintah Indonesia harus sadar bahwa sebagai negara yang meratifikasi The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, Australia berkewajiban untuk melindungi para pencari suaka kalau mereka yakin bahwa orang-orang tersebut dapat dikategorikan sebagai refugee (pengungsi).

Perlu diketahui bahwa definisi refugee pada konvensi tersebut adalah well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country (pasal 1 [2]).

Definisi yang luas tersebut bisa memasukkan para pencari suaka dari Papua sebagai refugee. Karena itu, kita tidak perlu heran kalau Senator Amanda Vanstone mengatakan bahwa pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua hanya merupakan pelaksanaan kewajiban hukum mereka.

Pendeknya, kegagalan menciptakan kesejahteraan dan keamanan di Papua sama saja mengundang dengan sengaja campur tangan pihak asing di

Papua. Jika hal ini tidak diperhatikan dan ditangani dengan serius oleh Presiden dan seluruh jajarannya, tidak mustahil nasib Timor Timur akan berulang di bumi Papua tercinta. Semoga saja tidak terjadi agar anak-anak kita tidak kehilangan kesempatan menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

Penulis adalah pengaja Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar dan kandidat doktor pada Faculty of Law, University of Sydney, Australia

TEMPO Interaktif, Jakarta